

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

Bab VI berisi uraian simpulan dan saran dari pemaparan pada bab sebelumnya.

#### A. Simpulan

1. Penerapan *Community development* pada rehabilitasi mangrove di Karangsong termasuk dalam bentuk *self-help* karena masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk merehabilitasi pesisir Karangsong. Sebagaimana dilihat pada indikator tipologi *community development* Mattaritta-Cascante dan Brennan (2012) yaitu indikator pandangan komunitas asosiasional, keuntungan interaksional, dengan *stakeholder* utama adalah kelompok Pantai Lestari, serta input, keterlibatan dan hasil pembelajarannya tinggi. Keterlibatan berbagai pihak pada kegiatan rehabilitasi mangrove dibatasi karena kelompok Pantai Lestari yang memegang kekuasaan penuh atas perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan tersebut.
2. Dampak lingkungan dari rehabilitasi mangrove dapat dilihat pada perubahan hutan mangrove yang semakin lebat dan berkembang menjadi ekowisata mangrove dan mangrove *center*. Dampak sosial dapat dilihat pada kohesivitas kelompok, yaitu adanya kesamaan nilai dalam melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove juga penerapan kurikulum mangrove pada 26 Sekolah Dasar di Indramayu. Sedangkan dampak ekonomi dari rehabilitasi mangrove dapat dilihat pada hasil penjualan tiket Kelompok Pantai Lestari yang tiap tahunnya mencapai satu miliar rupiah dan *multiplier effect* berupa bertambah banyaknya jumlah warung, jasa parkir serta *tour guide*.

3. Peran dari berbagai *stakeholder* pada rehabilitasi dan ekowisata berdampak pada *community development* masyarakat Karangsong yang pada awalnya berada pada tahap ideal, yaitu *self-help* menjadi *directed* atau diarahkan karena keterlibatan *stakeholder* membatasi kelompok dalam pengambilan keputusan.
4. Model *community development* rehabilitasi dan ekowisata mangrove di Karangsong dapat terlihat pada perubahan keterlibatan masyarakat yang pada awalnya berada pada tahap *self-help*, yaitu saat rehabilitasi mangrove. Namun berada pada tahap *directed* ketika dikembangkan menjadi ekowisata dan mangrove *center* serta adanya keterlibatan dan intervensi *stakeholder*. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan hutan mangrove dapat mempengaruhi atau bahkan membatasi keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan ataupun dalam perencanaan pengembangan hutan mangrove.
5. Rekomendasi model *community development* pada rehabilitasi ekowisata mangrove yaitu dengan menerapkan rekognisi atau pengakuan, *agency*, dan *building capacity*. Hal itu sesuai dengan tujuan utama *community development* yaitu untuk mencapai rekognisi sebagaimana disebutkan oleh Phillip dan Pittman.

## **B. Saran**

1. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan model tersebut yaitu; Pertama, *stakeholder* yang akan terlibat dalam pengembangan proyek sebuah *community* yang sudah berada pada tahap *self-help* harus mempunyai prinsip sebagai berikut yaitu: *stakeholder* dalam membuat perencanaan harus mempunyai landasan *felt-needs community*. Landasan

tersebut maksudnya adalah *stakeholder* menganalisis terlebih dahulu kebutuhan *community* dalam mengembangkan proyek garapan mereka. Landasan kedua yaitu *stakeholder* hanya berperan sebagai partisipan yang memberikan ide masukan, bantuan yang diperlukan kelompok. Sedangkan keputusan atau kewenangan dalam menjalankan perencanaan tersebut mutlak ditentukan oleh kelompok.

2. Kedua, *stakeholder* dari pihak pemerintah seharusnya mengapresiasi kelompok dengan melakukan rekognisi atau pengakuan bahwa kelompok mampu mengelola ekowisata mangrove. Hal itu dapat dilakukan dengan strategi *co-management* atau *community* institusional. Pengakuan ini juga sebagai suatu keharusan dalam melibatkan kelompok sebagai pengelola utama pada kawasan rehabilitasi dan ekowisata mangrove. Sebagaimana Mataritta-Cascante & Brennan (2012) menyebutkan bahwa peran *stakeholder* dibatasi hanya pada *facilitate*, *implement*, dan *receive*. Tidak ada ketentuan untuk melakukan perencanaan terhadap pengembangan sebuah proyek *community development* karena akan mereduksi perannya.
3. Penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan ekowisata mangrove dan dampak kebijakan Pemerintah Daerah Indramayu terhadap keberlanjutan daerah konservasi mangrove di Karangsong perlu digali lebih dalam. Hal ini untuk lebih memetakan peran masing-masing *stakeholder* dari sisi kebijakan. Pengelolaan ekowisata dari aspek *community based ecotourism management* juga diperlukan untuk mengetahui konteks politik, selain konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Selain itu, pentingnya kajian tentang *community development* di daerah lain juga diperlukan sebagai pembanding dan juga sebagai salah satu indikator keberhasilan *community*

*development* yang dapat diaplikasikan ke program atau wilayah lain. Elaborasi kajian penerapan *community development* pada daerah lain juga akan memperkaya dan lebih menyempurnakan keterbatasan penelitian ini yang hanya mengambil satu studi kasus saja.